

**ANALISIS DANA DEKONSENTRASI DAN
DANA APBD SEKTOR PENDIDIKAN DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2011**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

LEO HENDRA PERMANA

NIM. C2B008086

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Leo Hendra Permana
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008086
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP

Judul Skripsi : **“ANALISIS DANA DEKONSENTRASI
DAN DANA APBD SEKTOR
PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2003-2011”**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si

Semarang, 02 Juli 2013

Dosen Pembimbing,

(Evi Yulia Purwanti, S.E, M.Si)

NIP. 197107251997022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Leo Hendra Permana
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008086
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP

Judul Skripsi : ***“ANALISIS DANA DEKONSENTRASI
DAN DANA APBD SEKTOR
PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2003-2011”***

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal2013

Tim Penguji,

1. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si ()
2. Prof. Dr. Miyasto., SU ()
3. Dr. Nugroho SBM., M.SP ()

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

(Anis Chariri, M.Com., Ph.D)

NIP. 196708091992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Leo Hendra Permana menyatakan bahwa skripsi dengan judul : ***ANALISIS DANA DEKONSENTRASI DAN DANA APBD SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2011***, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 02 Juli 2012

Yang membuat pernyataan,

(Leo Hendra Permana)

NIM. C2B008086

ABSTRAK

Dana Dekonsentrasi merupakan dana bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk membantu peningkatan program-program pemerintah daerah yang masih menjadi perhatian pemerintah pusat yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Dana dekonsentrasi merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah pusat, dimana dana dekonsentrasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan bantuan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan membuktikan secara empiris perbedaan dengan adanya dana dekonsentrasi dan dana APBD terhadap angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Kajian dari penelitian ini menggunakan data kuantitatif, dengan jenis *time series* data. Data *time series* yang digunakan mulai periode 2003-2011. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda, untuk melihat perbedaan adanya dana dekonsentrasi dan tidak adanya dana dekonsentrasi dengan dana APBD untuk pendidikan dan perkembangan pendidikan dari tahun ke tahun.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dana dekonsentrasi dialokasikan ke pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini. Alokasi yang terbesar pada pendidikan dasar sekitar 90%, hasil uji beda menunjukkan bahwa adanya dana dekonsentrasi atau tidak adanya dana dekonsentrasi tidak memiliki perbedaan dengan dana APBD terhadap angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci : Dana Dekonsentrasi, APBD, Angka Putus Sekolah, Jawa Tengah

ABSTRACT

Deconcentration a grant from central government to the regions to help increase local government programs are still a central concern: education, health, infrastructure, and others. Deconcentration fund is part of central government expenditure, which consists deconcentration of personnel expenditure, spending on goods, and social assistance.

This study aims to analyze the allocation of deconcentration and demonstrate empirically difference deconcentration funds and funds from the budget of the school dropout rate in the province of Central Java. Study of this research uses quantitative data, the type of time series data. Time series data are used from the period 2003-2011. Analysis tools used are different test, to see the difference in the concentration funds and the absence of deconcentration funds with funds from the budget for education and educational development from year to year.

Results of the study showed that the concentration funds allocated to primary education, secondary education, early childhood education. The largest allocations to basic education about 90%, different test results indicate that the presence or absence of deconcentration deconcentration has no difference with funds from the province expenditure of the school dropout rate in the province of Central Java.

Keywords: Deconcentration, Province expenditure, Dropouts education, Central java

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, perlindungan dan syukur sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS DANA DEKONSENTRASI DAN DANA APBD SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2011”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, baik berupa dukungan doa, semangat, material, maupun spiritual. Oleh karena itu, terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Muhamad Nasir, M.Si, Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Hadi Sasana, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Johanna Maria Kodoatie SE.,MEc.,PhD selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, serta arahan kepada penulis.
4. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu disela kesibukan, serta telah sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian ini.
5. Ibu Dra. Tri Wahyu Rejekiningih, M. Si selaku dosen wali mahasiswa Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan angkatan 2008 Reg II.

6. Keluargaku, papah, mamah, kakak, dan Margaretha Ega Rindu untuk dorongan dan perhatian yang tidak pernah habis serta doa yang tidak pernah putus.
7. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama belajar di Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
8. Bapak Jasman dan Bapak Kia Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
9. Teman-teman Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2008 Reg II : Muji, Ketut, Tito, Andi, Ocy, Isty, Wanti, Haniz, Hera, Andika, Rekha, Iqbal, Bawang, Ryan, Gerhard, Berlian, Philip, Adelino, Yanuar. Terimakasih sudah banyak membantu, meluangkan waktu, memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berarti bagi penulis.
10. Teman-teman Team 1 KKN 2012 Desa Paren, terimakasih atas doa dan semangatnya.
11. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang juga ikut serta memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Semarang, 02 Juli 2013

Penulis,

Leo Hendra Permana

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.

(Matius 21:22)

Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, kedua orang tua dan orang lain.

Hidup adalah sebuah proses, hidup adalah belajar, tanpa mengenal batas umur dan tanpa mengenal kata tua.

Jatuh dalam keadaan apapun berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi, dalam sebuah proses pasti ada halangan.

Never Give Up

Buah karya ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orang Tua
- Kepada Sahabat-Sahabat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori	18
2.1.1 Pengeluaran Pemerintah	18
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	21
2.1.2.1 Kebijakan Fiskal	23
2.1.2.2 Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro	25

2.1.2.3	Pengeluaran Pemerintah Secara Makro.....	26
2.1.3	Gambaran Umum APBD	29
2.1.4	Gambaran Umum APBN	36
2.1.5	Anggaran Daerah.....	37
2.1.6	Pengertian Dana Dekonsentrasi	39
2.1.7	Pendidikan Sebagai Investasi	40
2.1.8	Putus Sekolah	42
2.1.9	Penyebab Putus Sekolah	43
2.2	Penelitian Terdahulu	45
2.3	Kerangka Pemikiran	51
2.4	Hipotesis	54
BAB III	METODE PENELITIAN	55
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	55
3.1.1	APBD	55
3.1.2	Dekonsentrasi	55
3.1.3	Angka Putus Sekolah.....	55
3.2	Jenis dan Sumber Data	56
3.3	Metode Pengumpulan Data	56
3.4	Metode Analisis	56
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	57
3.4.2	Uji Normalitas	57
3.4.2	Uji Beda.....	59
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	60
4.1.1	Provinsi Jawa Tengah	60

4.2	Statistik Deskriptif	64
4.3	Dana Dekonsentrasi Terhadap Pendidikan.....	65
4.4	Hasil Hipotesis Penelitian	91
BAB V	PENUTUP	94
5.1	Kesimpulan	94
5.2	Keterbatasan	96
5.3	Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	98
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Alokasi dana Dekonsentrasi pendidikan di Jawa Tengah	8
Tabel 1.2 Jumlah Siswa Segala Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011.....	12
Tabel 1.3 Angka Putus Sekolah Dalam Segala Tingkat Pendidikan di Jawa Tengah 2003-2011	12
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif	64
Tabel 4.2 Jumlah Total Dana Dekonsentrasi.....	66
Tabel 4.3 Dana Dekonsentrasi Mengenai Belanja Pegawai	80
Tabel 4.4 Dana Dekonsentrasi Mengenai Belanja Barang.....	83
Tabel 4.5 Dana Dekonsentrasi Mengenai Bantuan Sosial	86
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov test Antara Dana Dekonsentrasi dan Dana APBD	91
Tabel 4.7 Hasil Uji Korelasi antara Dana APBD dan Dana Dekonsentrasi	92
Tabel 4.8 Hasil Uji Wilcoxon Antara Dana APBD dan Dana Dekonsentrasi ..	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner	27
Gambar 2.2 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	28
Gambar 4.1 Peta Jawa Tengah	60

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	68
Diagram 4.2 Data Dekonsentrasi Program Pendukung Pendidikan Dasar	69
Diagram 4.3 Dana Dekonsentrasi Pendidikan Menengah	71
Diagram 4.4 Dana Dekonsentrasi Pendidikan Usia Dini	73
Diagram 4.5 Dana Dekonsentrasi Belanja Pegawai Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.....	76
Diagram 4.6 Belanja Barang Pendidikan Dasar	82
Diagram 4.7 Belanja Barang Pendidikan Menengah	83
Diagram 4.8 Bantuan Sosial Pendidikan Dasar	86
Diagram 4.9 Bantuan Sosial Pendidikan Menengah	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Share Dana Dekonasentrasi	73
Grafik 4.2 Share Belanja Barang Dana Dekonsentrasi	82
Grafik 4.3 Share Bantuan Sosial Dana Dekonasentrasi	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di ASIA, mempunyai keanekaragaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang semua dilandaskan pada asas bangsa Indonesia yaitu Pancasila. UUD 1945 merupakan landasan pemerintah dalam mengatur kegiatan pemerintah dan untuk pengambilan keputusan kebijakan. Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa orde baru merupakan sistem pemerintahan sentralistik. Pada saat itu pemerintah sedang dilanda oleh konflik krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat itu diyakini dengan sistem pemerintahan sentralistik akan dapat menanggulangi keadaan dan dengan dukungan pihak militer.

Sistem pemerintahan sentralistik adalah semua urusan pemerintah dikelola oleh pemerintah pusat tanpa ada ikut campur dari daerah, walaupun pada saat itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan. Sistem pemerintahan sentralistik sebenarnya cukup menekan masyarakat. Masyarakat tidak diberikan ruang untuk berkembang dalam kegiatan apapun dengan alasan untuk memelihara stabilitasi.

Sistem pemerintahan sentralistik di Indonesia berjalan selama 32 Tahun. Setelah runtuhnya orde baru muncul gagasan untuk mengubah pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik. Sistem ini mengacu pada pelimpahan kewenangan ke daerah namun hanya beberapa bidang saja yang diserahkan kepada daerah dan diatur melalui Undang-Undang.

Sejak ditetapkannya Otonomi Daerah atau pelimpahan kewenangan, Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagian urusan pemerintahan telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah diberikan dana perimbangan dan/atau hibah dari APBN dan kewenangan untuk memungut dan mengelola perpajakan daerah (local taxing power) serta kewenangan untuk melakukan pinjaman. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, sebagian urusan pemerintahan telah diserahkan kepada pemerintahan daerah. Urusan utama pemerintahan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, penyediaan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat telah dilimpahkan kepada pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah (otonomi daerah). Sementara pemerintah pusat hanya melaksanakan 6 (enam) urusan pemerintahan yang bersifat mutlak, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, serta beberapa urusan yang tidak diserahkan kepada daerah. Pemerintah Pusat beranggapan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab daerah dalam pembangunan perekonomian daerah. Pemerintah Pusat meyakini secara administratif akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam hal perencanaan dan mengambil keputusan tentang

pertanggungjawaban publik yang tercantum pada Undang-Undang 32 Tahun 2004.

Bidang-bidang yang tercantum pada Undang-Undang tersebut tidak mudah untuk diatasi terutama bidang-bidang publik yang mungkin akan membutuhkan biaya yang tinggi seperti halnya di bidang pendidikan, pekerjaan umum dan kesehatan yang bidang-bidang tersebut selalu dibutuhkan masyarakat umum. Bidang yang penting untuk membuat kemajuan setiap daerah adalah bidang pendidikan, dikarenakan sangat penting untuk SDM yang baik dalam melaksanakan kegiatan apapun sehingga dapat mengikuti perkembangan setiap tahun.

Undang-Undang 33 Tahun 2004, Sistem pendanaan atas urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasar prinsip (*money follow functions*), pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, karena pemerintahan pada hakikatnya harus melaksanakan tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi.

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Dalam upaya untuk melaksanakan amanat tersebut Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia .

Visi Pendidikan Nasional adalah mewujudkan system pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab segala tantangan zaman yang selalu berubah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang diambil Pemerintah dalam mewujudkan visi tersebut antara lain (KEMENDIKNAS):

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang mempunyai daya saing tingkat nasional, regional maupun internasional.
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.
4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini, mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
5. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Lembaga Pendidikan.
6. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi (KEMENDIKNAS):

- 1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik, Sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran ke-paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan bergeser keparadigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya.
- 2) Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini Pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik permasalahan yang bersifat internal maupun eksternal, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain factor internal tantangan yang paling berat bagi bangsa Indonesia pada era globalisasi pada abad ke- 21 ini adalah bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing. Hanya dengan

bermodalkan manusia yang cerdas, unggul dan berdaya saing suatu bangsa akan mampu bermitra dan berkompetisi pada tataran global. Pada hal kita tahu bahwa gambaran umum mutu Sumber Daya Manusia Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh UNDP setiap tahun menunjukkan tingkat pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia ternyata masih memprihatinkan, demikian juga peringkat Indeks Pertumbuhan Daya saing Indonesia masih sangat rendah belum sesuai yang kita harapkan, kondisi ini adalah sebuah realitas yang menjadi isyarat bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia harus bekerja keras secara terus menerus dan konsisten meningkatkan mutu pendidikan manusia dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu wahana dalam pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, unggul dan berdaya saing (Abdul Kadir Karding, 2008).

Pada kenyataannya Pemerintah Daerah tidak dapat mengelola sendiri bidang-bidang tersebut terutama pada bidang pendidikan. Pembinaan bidang pendidikan memang perlu biaya yang cukup tinggi apalagi pada tingkat Provinsi, yang memiliki beberapa kota/kabupaten dengan pendapatan daerah berbeda-beda. Sehingga masih memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk membantu dalam dana pendidikan di setiap daerah yang masih kurang dalam menangani bidang pendidikan.

Tujuan pemerintah pusat tentang sekolah wajib 9 tahun tersebut memang sangat perlu untuk memberi pengarahan kepada masyarakat bahwa pendidikan sangat penting dalam kehidupan dan pembangunan daerah. Sehingga pemerintah

pusat memberikan perhatian terhadap pendidikan walaupun pemerintah daerah sudah diberi kewenangan Otonomi Daerah. Namun pemerintah pusat tetap membantu dengan dana APBN yang dikeluarkan untuk membantu bidang-bidang publik yang sekiranya pemerintah daerah tidak dapat melakukan pengembangan dengan dana APBD. Dana yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut antara lain dana dekonsentrasi terutama dibidang pendidikan.

Dana dekonsentrasi dikeluarkan oleh pemerintah pusat namun semua kegiatan tidak dilakukan oleh pemerintah pusat kewenangan pengaturan dan pengelolaan semuanya dilimpahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sepenuhnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang menangani tentang bidang pendidikan. Namun untuk semua kegiatan tentang pelaporan dana dekonsentrasi tetap dilaporkan pemerintah pusat untuk mengetahui perkembangan apa yang sudah terjadi pada daerah.

Pada Provinsi Jawa Tengah dana dekonsentrasi dikelola dan disalurkan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah semua kegiatan, penyaluran dan laporan semua dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dana dekonsentrasi pendidikan di provinsi Jawa Tengah untuk membantu non fisik (beasiswa siswa kurang mampu, pelatihan pendidik) selain membantu non fisik alokasi dana dekonsentrasi apakah tersalur dengan lancar dan untuk kegiatan apasaja sebab tidak diketahui alokasi dana dekonsentrasi untuk apasaja dan ada perbedaan atau tidak dengan sebelum adanya dana dekonsentrasi dengan sesudah adanya dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi untuk membantu perkembangan

mutu pada pendidikan di Jawa Tengah. Semua kegiatan dana dekonsentrasi dapat dilihat pada tabel 1.1 Jumlah Total Dana Dekonsentrasi.

Dalam tabel dapat dilihat semua program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan mutu pada pendidikan. Dalam tabel dapat dilihat saluran dana dekonsentrasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu 1. Pendidikan Dasar; 2. Pendidikan Menengah; 3. Pendidikan Usia Dini, setelah pembagian tersebut baru ada program ditentukan untuk meningkatkan mutu pada masing-masing tingkat pendidikan tersebut.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Dekonsentrasi Sektor Pendidikan di Jawa Tengah 2007-2011

No	Program	Tahun								
		2007	2008	Growth	2009	Growth	2010	Growth	2011	Growth
A	Pendidikan Dasar	1.570.200.009.000	2.234.906.939.000	42%	2.198.043.867.000	-2%	2.056.254.853.000	-6%	1.127.190.370.000	-45%
	beasiswa operasional sekolah	1.367.547.813.000	1.327.724.117.000	-3%	2.023.876.774.000	52%	2.000.188.214.000	-1%	1.058.570.667.000	-47%
	perluasan dan peningkatan mutu SMP	86.597.507.000	32.626.788.000	-62%	21.108.180.000	-35%	19.441.832.000	-8%	52.036.155.000	168%
	perluasan dan peningkatan mutu SD	104.395.800.000	119.614.438.000	15%	19.089.637.000	-84%	1.718.359.000	-91%	512.820.000	-70%
	pembangunan SD-SMP satu atap	-	13.600.000.000	-	9.904.823.000	-27%	-	-	-	-
	penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP	-	39.936.960.000	-	58.622.400.000	47%	21.132.100.000	-64%	4.127.000.000	-80%
B	Pendidikan Menengah	113.810.397.000	39.261.894.000	-66%	225.053.556.000	473%	181.397.342.000	-19%	388.448.348.000	114%
	Perluasan Mutu SMA	53.127.359.000	30.681.528.000	-42%	33.128.482.000	8%	21.848.055.000	-34%	19.490.969.000	-11%
	Perencanaan peningkatan mutu dan evaluasi SMK	60.683.038.000	1.212.528.000	-98%	10.645.688.000	778%	1.243.440.000	-88%	7.940.064.000	539%
	beasiswa untuk siswa miskin jenjang dikmen	-	84.078.540.000	-	67.861.140.000	-19%	62.907.780.000	-7%	76.406.995.000	21%
	rehab. Ruang kelas jenjang pendidikan menengah	-	1.012.500.000	-	1.750.000.000	73%	-	-	-	-
	bantuan operasional manajemen Mutu (BOMM) SMA	-	3.750.000.000	-	24.652.710.000	557%	33.279.660.000	35%	37.858.865.000	14%
	bantuan operasional manajemen Mutu (BOMM) SMK	-	35.534.741.000	-	62.845.635.000	77%	62.118.407.000	-1%	28.655.130.000	-54%
C	Pendidikan Usia Dini	14.824.772.000	8.513.939.000	-43%	577.197.000	-93%	257.925.000	-55%	141.308.714	-45%

Sumber : Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah diolah

Tabel 1.1 menunjukkan pembagian dana dekonsentrasi diantara pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan usia dini serta program-program yang disalurkan melalui dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi untuk Provinsi Jawa Tengah memang tidak selalu menanjak. Pada tahun 2007-2011 memang ada kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pemberian bantuan tersebut.

Pada tahun 2007 Dana dekonsentrasi yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.570.200.009.000,- untuk semua kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan usia dini, pada tahun 2008 terjadi kenaikan yang cukup tinggi mencapai 42% (Rp. 2.234.906.939.000,-) dari dana yang didapatkan pada tahun 2007. Tahun 2009 terjadi penurunan dana dekonsentrasi sebesar Rp. 2.198.043.867.000,- (2%) dari tahun 2008, penurunan tersebut dapat terlihat ada perubahan pada program yang dilaksanakan pada tahun 2009 memang adanya penurunan yang cukup pada program perluasan mutu SD. Dengan adanya penurunan dana dekonsentrasi pada tahun 2009 tidak merubah semua program yang dilaksanakan memang ada pengurangan pada peningkatan mutu SD namun pemerintah melihat bahwa lebih penting dialokasikan ke dalam dana BOS (Basiswa Operasional Sekolah).

Pada tahun 2010-2011 selalu terjadi penurunan terus menerus terhadap dana dekonsentrasi Jawa Tengah yang dialokasikan ke sektor pendidikan. Dinas Pendidikan provinsi Jawa Tengah tetap menjalankan program yang telah direncanakan dengan lancar walaupun ada penurunan dana dekonsentrasi. Program yang dilaksanakan pada tabel 1.1 tersebut sesuai dengan kebutuhan atau

keadaan yang perlu dikembangkan pada tahun tersebut menurut daerah-daerah yang membutuhkannya.

Pemerintah sudah berusaha memperbaiki mutu pendidikan melalui dana dekonsentrasi pada provinsi Jawa Tengah, namun angka putus sekolah masih tinggi dengan rata-rata 5000 hingga 2000 anak putus sekolah. Dapat dilihat pada tabel 1.2 walaupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan memberikan bantuan untuk semua kegiatan pendidikan, tetap saja tiap tahun masih muncul angka putus sekolah yang cukup tinggi.

Tabel 1.2
Jumlah Siswa Segala Tingkat Pendidikan di Jawa Tengah 2007-2011

Pendidikan	Jumlah Siswa								
	2007	2008	Growth	2009	Growth	2010	growth	2011	growth
SD	3.024.252	3.110.358	3%	3.297.612	6%	3.250.196	-1%	3.287.127	1%
SMP	1.175.991	1.186.213	1%	1.233.311	4%	1.236.413	0%	1.263.311	2%
SMA	387.268	388.485	0%	389.602	0%	393.246	1%	381.158	-3%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.3
Angka Putus Sekolah Segala Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011

No	Pendidikan	2007	2008	Growth	2009	growth	2010	growth	2011	Growth
1	SD	7.603	7.506	-1%	7.446	-1%	4.658	-37%	5.142	10%
2	SMP	10.214	8.907	-13%	7.944	-11%	6.946	-13%	5.621	-19%
3	SMA	3.260	2.744	-16%	2.321	-15%	2.054	-12%	2.025	-1%

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 menggambarkan bahwa masih banyak terdapat angka putus sekolah. Pada tahun 2007 terdapat anak putus sekolah sebesar 7.603 anak dan jumlah siswa 3.024.252 anak pada tingkat SD, pada tingkat SMP 10.214 anak dan jumlah siswa 1.175.991 anak, pada tingkat SMA 3.260 anak dan jumlah siswa 387.158 anak. Dengan melihat tabel tersebut memang sudah ada perkembangan dengan adanya penurunan angka putus sekolah tiap tahun, walaupun dengan skala yang tidak begitu besar.

Pada tahun 2008 terjadi penurunan angka putus sekolah, pada tingkat SD 7.506 anak (1%), pada tingkat SMP 8.907 anak (13%), pada tingkat SMA 2.744 (16%), dari jumlah siswa pada tingkat SD 3.110.358 anak, pada tingkat SMP 1.186.213 anak, dan pada tingkat SMA 388.485 anak. Penurunan tersebut juga selalu terjadi pada tiap tahun yang cukup menggembirakan, sehingga bantuan tersebut berjalan sesuai rencana apa yang diharapkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membantu melalui dana dekonsentrasi tersebut memang bagus pada bidang pendidikan, memang butuh proses yang cukup lama untuk menuntaskan semua masalah yang ada pada bidang pendidikan. Namun pemerintah daerah terutama Jawa Tengah akan tetap berusaha membantu secara baik untuk meningkatkan mutu dan menuntaskan masalah pendidikan seperti angka putus sekolah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan ekonomi pada suatu daerah dilihat bukan hanya pada pendapatan pemerintah tetapi juga melihat beberapa aspek yang mempengaruhi

pembangunan sehingga bisa tercipta kondisi yang sejahtera pada masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat pada pendidikan.

Pendidikan merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu daerah, dengan mutu pendidikan yang cukup bagus maka secara tidak langsung pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Pelaksana kegiatan perekonomian merupakan masyarakat yang ada pada Provinsi Jawa Tengah.

Karena itu pemerintah memberikan kebijakan dana dekonsentrasi, sehingga dana dekonsentrasi dialokasikan ke beberapa sektor pada aspek beasiswa, peningkatan fasilitas sekolah yang memadai dan lain-lain. Dengan pengadaan tersebut pemerintah berharap untuk memperbaiki mutu dan mengurangi angka putus sekolah yang selalu terjadi pada setiap tahun.

Studi yang pernah dilakukan bahwa dana dekonsentrasi dapat meningkatkan sarana prasaranan, membantu dalam pembiayaan, meningkatkan mutu sekolah terhadap pendidikan selama ini, namun masih saja ada masalah muncul. Setiap tahun angka putus sekolah mengalami penurunn. Menurut Desi Dwi Bastias (2010) dalam penelitiannya diungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kuat dengan pertumbuhan ekonomi, terutama jenis pengeluaran pemerintah yang pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran tersebut adalah pengeluaran atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam penelitian yang terdahulu juga menghasilkan kesimpulan pengaruh pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi tidak konsisten bisa negatif dan positif.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana alokasi dana dekonsentrasi pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2011?
2. Apakah ada pengaruh dana dekonsentrasi dengan angka putus sekolah pada Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007-2011?
3. Adakah perbedaan sebelum adanya dana dekonsentrasi dan sesudah adanya dana dekonsentrasi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian secara umum ingin melihat perkembangan pendidikan yang terjadi pada Jawa Tengah, namun yang secara khusus adalah untuk :

1. Menganalisis alokasi dana dekonsentrasi terhadap pendidikan di Jawa Tengah 2007-2011.
2. Menganalisis pengaruh dana dekonsentrasi dengan angka putus sekolah di Jawa Tengah pada tahun 2007-2011.
3. Menganalisis perbedaan dengan sebelum adanya dana dekonsentrasi dengan sesudah adanya dana dekonsentrasi.

1.3.2. Kegunaan

1. Hasil penelitian ini sebagai sumber masukan bagi pemerintah Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan peningkatan pendidikan yang akan datang.

2. Dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti yang lain dengan tipe penelitian sejenis.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa khususnya.

1.4 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pengeluaran pemerintah dan dana dekonsentrasi yang mempengaruhi mutu pendidikan. Selanjutnya dirumuskan masalah penelitian tentang bagaimana alokasi dan pengaruh dana dekonsentrasi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dengan angka putus sekolah di seluruh tingkatan pendidikan di Jawa Tengah. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian akhir bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

BAB II Telaah Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi pengeluaran pemerintah, dana dekonsentrasi, dan putus sekolah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang variabel dan definisi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta model analisis yang digunakan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskriptif biografi Jawa Tengah, realisasi dan pertumbuhan dana dekonsentrasi, pertumbuhan angka putus sekolah dan dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri atas tiga bagian: bagian pertama merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, dan bagian kedua adalah keterbatasan dan bagian ketiga adalah saran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 APBD Untuk Sektor Pendidikan

Anggaran daerah merupakan anggaran yang direncanakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendidikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam periode tahunan dalam satuan rupiah.

3.1.2 Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pengeluaran pemerintah pusat untuk menumbuhkan perekonomian dan bidang-bidang lain, ada yang berpendapat mereka menghubungkan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi dengan satuan Rupiah yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

3.1.3 Angka Putus sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan petunjuk bahwa masih banyak orang yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan banyak faktor yang mempengaruhi. Angka Putus Sekolah juga sebagai petunjuk bahwa SDM di Provinsi Jawa Tengah masih banyak yang kurang. Dalam usaha ini pemerintah melakukan perbaikan dalam sektor pendidikan terutama mengurangi angka putus sekolah yang masih tinggi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Dinas Pendidikan provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik, Kemenkeu, BPKP, BAPPENAS yaitu:

- a. Dana dekonsentrasi Jawa Tengah tahun 2007-2011.
- b. APBD Jawa Tengah sektor Pendidikan pada tahun 2003-2011.
- c. Angka putus sekolah di semua sektor pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA yang terdapat di Jawa Tengah 2003-2011.
- d. Undang-undang pengeluaran pemerintah yang mengatur dalam semua kegiatan pemerintah daerah .

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan tehnik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, dan Bappenas. Data yang diperoleh dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat

tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diolah.

Dalam analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T dependen yang digunakan untuk melihat hubungan antara dana dekonsentrasi dan dana APBD terhadap angka putus sekolah.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3.4.2 Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus

diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali,2006).

Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata

(*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

3.4.3 Uji Beda

Untuk pengujian perbedaan mean antara dua kelompok data yang dependen. Uji ini banyak digunakan untuk penelitian eksperimen.

Syarat/asumsi yang harus dipenuhi:

- Data berdistribusi normal atau simetris
- Kedua kelompok dependen
- Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik untuk variabel dependen dan dikategorikan dengan hanya dua kelompok untuk variabel independen

Hipotesis dalam uji beda adalah bila kita menyatakan perbedaan sebenarnya pada populasi dengan:

Hipotesis = sebelum adanya dana dekonsentrasi – sesudah adanya dana dekonsentrasi . Maka hipotesis dapat ditulis:

H_0 = tidak ada beda angka putus sekolah antara sebelum dan sesudah adanya dana dekonsentrasi

H_1 = ada beda angka putus sekolah antara sebelum dan sesudah adanya dana dekonsentrasi. Jika probabilitas $(p) > 0.05$ H_0 diterima, jika probabilitas $(p) < 0.05$ maka H_1 diterima.

Dapat dibuktikan dengan rumus uji T :

$$T = \frac{d}{Sd_d / \sqrt{n}}$$

Df = n - 1

D = rata-rata deviasi/selisih nilai sesudah dengan sebelum

SD_d = standar deviasi dari nilai d/selisih sampel 1 dan sampel 2